

RAKORNAS KEMKOMINFO 2014



Jakarta, 20 November 2014



MATERI PAPARAN

A. EXECUTIVE SUMMARY

B. PROGRAM DITJEN PPI 2015-2019

C. REDESIGN USO

A. EXECUTIVE SUMMARY

- Tahun 2014 ini adalah masa transisi sebelum memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke tiga tahun 2015-2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Dengan memperhatikan hal dimaksud maka kebijakan Nasional harus diarahkan untuk mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi;
- Untuk dapat mewujudkan industri Telekomunikasi, industri Pos dan industri Penyiaran dapat berjalan kondusif dan penyelenggaraannya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan (*based to regulation*) sehingga menghasilkan standar kualitas pelayanan terbaik untuk yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kualitas layanan bidang pos dan informatika;
- Disamping peranan Pemerintah sebagai regulator, juga ada peran penting dari Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam penyebaran informasi di seluruh wilayah Indonesia yaitu Peran untuk membangun infrastruktur pos dan informatika. Melalui dana *Universal Service Obligation*/Kewajiban Pelayanan Universal

- Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dimana para penyelenggara telekomunikasi tidak membangun dikarenakan *demand* yang rendah, hal ini dilakukan untuk mengatasi *digital divide* yang terjadi di wilayah Indonesia. Selain itu akan digunakan juga untuk membangun fasilitas infrastruktur untuk digunakan secara bersama oleh para penyelenggara sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan telekomunikasi yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia termasuk daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di bidang TIK, saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2014 Tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 guna mendukung pembangunan dan pemanfaatan pitalebar yang efektif dan efisien yang terintegrasi melalui sinkronisasi, sinergi serta koordinasi lintas sektor dan wilayah;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada tahun mendatang kita masih mempunyai pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan usaha yang besar, yang akan dirumuskan dalam program yang komprehensif sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Kemkominfo.

B. PROGRAM DITJEN PPI

2015-2019

B. PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2015-2019

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	Tidak dapat dilaksanakannya pembukaan akses pasar dikarenakan para penyelenggara pos tidak dapat memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 15, pasal 50 dan pasal 51	Penyusunan Naskah Akademis Revisi UU Pos Penyusunan Draft awal Revisi UU Pos	Pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos Harmonisasi Draft Revisi UU Pos	Pembahasan RUU dengan DPR RI	Implementasi UU dan PP Pos		<ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim usaha Perposan akan kondusif 2. PT. Pos dapat tersehatkan. 3. Pembukaan kompetisi dapat dimulai

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
2.	PSO KPCLPU	Belum cukupnya payung hukum untuk menarik kontribusi LPU secara memadai. (Besaran kontribusi terlalu kecil)	Penambahan dana operasional (PSO) untuk 2330 KPCLPU	Penambahan dana operasional (PSO) untuk 2335 KPCLPU	Penambahan dana operasional (PSO) untuk 2340 KPCLPU	Penambahan dana operasional (PSO) untuk 2345 KPCLPU	Penambahan dana operasional (PSO) untuk 2350 KPCLPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlayaninya masyarakat daerah terpencil/terluar terhadap layanan pos (aksesibilitas, konektivitas) 2. Tidak terbebannya APBN
3.	Pembangunan Tugu Berkode Pos	Selama ini pengamanan aset nasional berupa pulau terluar belum menjadi prioritas/concern pemerintah.	Pembangunan 6 tugu berkode pos di daerah perbatasan	Pembangunan 10 tugu berkode pos di daerah perbatasan	Pembangunan 15 tugu berkode pos di daerah perbatasan	Pembangunan 20 tugu berkode pos di daerah perbatasan	Pembangunan 25 tugu berkode pos di daerah perbatasan	Terjaganya kedaulatan negara.

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
4.	Penyusunan UU Konvergensi (UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran)	<p>1. UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran sudah <i>out of date</i> karena saat ini belum sepenuhnya dapat mendukung perkembangan kelembagaan, industri, dan teknologi</p> <p>2. PP tertinggal dengan perkembangan teknologi</p> <p>3. Peraturan Menteri <i>up to date</i> namun landasan hukumnya sudah tidak memadai</p>	<p>1. Penyempurnaan naskah akademis</p> <p>2. Penyusunan dan penyempurnaan RUU Kovergensi</p> <p>3. Usulan Prolegnas RUU</p>	<p>1. Pembahasan antar Kementerian</p> <p>2. Harmonisasi perubahan RUU Konvergensi</p> <p>3. Pembahasan RUU Konvergensi dengan DPR</p>	Lanjutan Pembahasan RUU Kovergensi dengan DPR	Implementasi UU Konvergensi dan penyusunan RPP beserta peraturan pelaksanaan	<p>1. Meningkatkan daya saing</p> <p>2. Menciptakan industry telekomunikasi dan penyiaran tertib dan sehat;</p> <p>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
5.	Penyusunan RUU Migrasi Digital	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran belum mengakomodasi pemberlakuan perubahan dari system analog ke digital ; Belum adanya kebijakan yang mengikat berkaitan dengan migrasi analog ke digital yang perlu diatur setingkat undang-undang Keengganan lembaga penyiaran swasta <i>free-to-air</i> untuk beralih ke teknologi digital 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan naskah akademis Penyusunan dan penyempurnaan Draft RUU Migrasi Digital Usulan Prolegnas RUU Harmonisasi RUU Migrasi Digital 	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan RUU Konvergensi dengan DPR 	Implementasi UU Konvergensi dan penyusunan RPP beserta peraturan pelaksanaan			<ol style="list-style-type: none"> Menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan migrasi analog ke digital Meningkatkan kualitas mutu siaran; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
6.	Pembangunan Infrastruktur Palapa Ring dan Infrastruktur Pasif	<p>1. Pembangunan jaringan telekomunikasi belum merata</p> <p>2. Kurangnya peran pemerintah dalam mendukung pembangunan akses broadband (right of way, infrastruktur pasif, akses gedung/kawasan)</p> <p>3. Kurangnya koordinasi antar K/L dan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.</p>	<p>1. Penyusunan regulasi terkait dengan proyek palapa ring</p> <p>2. Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa</p> <p>3. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kontrak</p> <p>4. Pembangunan ducting di 2 kota</p>	<p>1. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kontrak</p> <p>2. Pembangunan ducting di 4 kota</p>	<p>1. Pemanfaatan /pengoperasian infrastruktur yang sudah dibangun</p> <p>2. Pembangunan ducting di 4 kota</p>	<p>1. Pemanfaatan /pengoperasian infrastruktur yang sudah dibangun</p> <p>2. Pembangunan ducting di 5 kota</p>	<p>1. Pemanfaatan /pengoperasian infrastruktur yang sudah dibangun</p> <p>2. Pembangunan ducting di 6 kota</p>	<p>1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat</p> <p>2. Multiplier effect untuk layanan pemerintah, produktivitas nasional dan efisiensi industry</p> <p>3. Pemerataan Informasi di seluruh wilayah Indonesia</p>

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
7.	Pembangunan Government Radio Network	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah Inefisiensi belanja IT Pemerintah 	Kajian tentang Jaringan Pemerintah (GN) di Indonesia dan penyusunan regulasi GN	persiapan penyediaan backbone GN dalam rangka e-gov	implementasi penyediaan backbone GN di pemerintah pusat / K/L dan LPNK	implementasi penyediaan backbone GN di Pemerintah Daerah (5%)	implementasi penyediaan backbone GN di Pemerintah Daerah (5%)	<ol style="list-style-type: none"> Efisiensi APBN Keamanan Informasi Pemerintah
8.	Pembangunan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya koordinasi yang terpusat Jaringan yang ada masih terpisah-pisah belum terintegrasi 	Regulasi, management, lokasi kantor dan pembagunan Data Center	Pembangunan jaringan dengan BNPB dan telekomunikasi seluler	Pembangunan jaringan dengan BMKG dan telekomunikasi seluler	Pembangunan jaringan PU dan instansi terkait dengan internet	Pembangunan Jaringan Vulkanologi, Kehutanan dan penyiaran	Terwujudnya daya tahan dan daya antisipasi (<i>early warning and emergency response</i>) masyarakat terhadap bencana

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
9.	Pembangunan ITTS Tahap II	Sarana dan prasarana siaran LPP TVRI sudah <i>out of date</i> dan masih berteknologi analog.	Pelaksanaan proyek ITTS-2 (tahun pertama)	Pelaksanaan dan Penyelesaian proyek ITTS-2 (tahun kedua)	Pengembangan jaringan infrastruktur penyiaran untuk wilayah terpencil, terluar dan perbatasan (pengadaan pemancar DVB-T2 ≥ 1 kw & kelengkapannya) (4 lokasi)	Pengembangan jaringan infrastruktur penyiaran untuk wilayah terpencil, terluar dan perbatasan (pengadaan pemancar DVB-T2 ≥ 1 kw & kelengkapannya) (5 lokasi)	Pengembangan jaringan infrastruktur penyiaran untuk wilayah terpencil, terluar dan perbatasan (pengadaan pemancar DVB-T2 ≥ 1 kw & kelengkapannya) (6 lokasi)	Terwujudnya LPP yang sehat yang independen, netral dan tidak berorientasi pada keuntungan.

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
10.	Implementasi migrasi TV Digital	<p>1. Keengganan lembaga penyiaran swasta <i>free-to-air</i> untuk beralih ke teknologi digital.</p> <p>2. Aturan hukum yang tersedia masih perkarakan di Mahkamah Agung (<i>judicial review</i>).</p>	70% (SULAWESI+KALIMANTAN (Kec. Kalsel dan Gorontalo)	85% (SULAWESI)	95% (MALUKU +PAPUA+ Bangka Belitung+ Gorontalo)	100% (NATION WIDE ANALOG SWITCH OFF)		<p>1. Terwujudnya <i>diversity of ownership</i> dan <i>diversity of content</i>.</p> <p>2. <i>Entry barrier</i> peluang penyelenggaraan penyiaran menjadi rendah.</p>

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
11.	Layanan perizinan terpadu	Belum lengkapnya sarana dan sistem (SoP) untuk menjalankan layanan perizinan terpadu di bidang pos, telekomunikasi, Telsus PPKU, dan Penyiaran	Uji coba sistem perijinan terpadu secara online jasa pos, jasa telekomunikasi dan khusus pemerintah dan non pemerintah	Implementasi dan penyempurnaan sistem perijinan terpadu secara online untuk perijinan jasa pos, jasa telekomunikasi, jasa telekomunikasi khusus pemerintah dan non pemerintah serta uji coba sistem perijinan terpadu secara online penyiaran dan jaringan telekomunikasi	Implementasi dan penyempurnaan sistem perijinan terpadu secara online untuk jasa pos, telekomunikasi, khusus dan penyiaran	Implementasi dan penyempurnaan sistem perijinan terpadu secara online untuk jasa pos, telekomunikasi, khusus dan penyiaran	Implementasi dan penyempurnaan sistem perijinan terpadu secara online untuk jasa pos, telekomunikasi, khusus dan penyiaran	Efisiensi dan transparansi layanan perizinan

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
12.	Pembangunan aksesibilitas dan kualitas pelayanan telekomunikasi di daerah terpencil/terluar	Skala ekonomi (<i>demand</i>) tidak terpenuhi untuk dijalankan secara komersial	1.Pembangunan 50 BTS 2. Penyediaan akses broadband internet di 50 titik lokasi	1.Pembangunan 150 BTS 2. Penyediaan akses broadband internet di 500 titik lokasi	1.Pembangunan 150 BTS 2. Penyediaan akses broadband internet di 1000 titik lokasi	1.Pembangunan 250 BTS 2. Penyediaan akses broadband internet di 1500 titik lokasi	1.Pembangunan 250 BTS 2. Penyediaan akses broadband internet di 2000 titik lokasi	1. Pemerataan akses bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Penguatan NKRI 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI					OUTCOMES
			2015	2016	2017	2018	2019	
13.	Dukungan peningkatan terhadap industri TIK dalam negeri(TKDN) 3G dan BWA	<ol style="list-style-type: none"> Besarnya import perangkat TIK yang membebani neraca pembayaran; Kecilnya peran industri manufaktur dalam negeri; Rendahnya rekayasa teknologi dalam negeri; Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia 	<p>Kandungan Dalam Negeri (KDN) CAPEX : 35 % OPEX : 70 %</p>	<p>Kandungan Dalam Negeri (KDN) CAPEX : 37,5 % OPEX : 75 %</p>	<p>Kandungan Dalam Negeri (KDN) CAPEX : 40 % OPEX : 80%</p>	<p>Kandungan Dalam Negeri (KDN) CAPEX : 42,5 % OPEX : 85 %</p>	<p>Kandungan Dalam Negeri (KDN) CAPEX : 45 % OPEX : 90 %</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya kemandirian terhadap industri TIK Nasional Efisiensi devisa Peningkatan sumber daya manusia

C. REDESIGN PROGRAM
KPU/USO

Grand-design atau Re-design?

- Grand design: perubahan fundamental aturan, kelembagaan, keuangan, butuh 3 tahun untuk dijalankan.
- Redesign: kondisi As-Is, dimulai tahun depan, dilaksanakan selama 3 tahun ke depan.

KONSEP REDESAIN USO

BOTTOM UP

Program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat

KOMPREHENSIF

tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem (pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk meningkatkan tilisasi infrastruktur.

PILOTING

Program bersifat cluster (tidak nasional) sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah untuk mempermudah kontrol.

SINERGIS

Melibatkan stake holder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan sinergitas program dengan pihak terkait.



STAKE HOLDER

Dalam pelaksanaan redesign program KPU/USO terdapat 4 (empat) Stake Holder (pihak terkait) yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan program/kegiatan (Bottom up), yaitu :

1. Pemerintah Daerah;
2. Kementerian/Lembaga;
3. Operator Telekomunikasi;
4. Kelompok Masyarakat (LSM, Organisasi Kemasyarakatan,dll).

SASARAN PROGRAM USO

DIGITAL DIVIDE

- a. Memperluas coverage (akses) layanan telekomunikasi untuk mengurangi blankspot.
- b. Jenis akses layanan :
 - Telepon (BTS)
 - Internet (Wifi)
- c. Clustering sesuai kondisi, dan kebutuhan daerah.
- d. Survey untuk mengetahui tingkat kesenjangan digital masing-masing daerah.

SUPPORTING INDUSTRI

- a. Menyediakan sarana kompetisi bagi industri..
- b. Jenis sarana :
 - Backbone, Backhaul
 - Ekosistem broadband
 - Menara/Ducting
- c. Kolaborasi dengan operator, Pemerintah Daerah , dan Kementerian Teknis lainnya.
- d. Kesiapan dan dukungan stake holder.

CONTOH PROGRAM (TENTATIVE)

DIGITAL DIVIDE

- Palapa Ring
- FTTB Fiber to the Building dengan pengoperasian Open Access (40% e-Gov: 60% public access)
- Wifi Ruang Terbuka
- Back-haul e-Gov (wired/wireless)
- BTS Coverage
- Mobile IPOP/MPLIK - Layanan publik keliling dari kementerian terkait difasilitasi dengan Konektifitas Broadband oleh USO

SUPPORTING INDUSTRI

Infrastruktur:

- Infrastruktur Pasif - bimbingan teknis penyusunan regulasi, hibah daerah, pembentukan BUMD pengelola infrastruktur
- Infrastruktur Bersama - Tower hibah daerah dan pembentukan BLUD/BUMD infrastruktur TIK

Layanan:

- Insentif Aplikasi Awan untuk e-Gov di NIX
- Insentif Inkubator Konten

Keahlian:

- Aplikasi Sertifikasi TIK Nasional/ASEAN (kegiatan nasional)
- Pembentukan Pusat Sertifikasi TIK Nasional/ASEAN (proposal dari Sekolah/Akademi/Universitas untuk biaya operasi)

Sistem Pendukung:

- Industri Sabak Nasional untuk Captive Market e-Gov (setahun satu pabrik).
- Program Nasional Sejuta Tablet Android untuk aplikasi awan e-Gov (hibah daerah dan sekolah, murah dengan monopsony, ditanam patch untuk link ke NIX, aplikasi awan)
- Insentif Pembentukan ISP dan Helpdesk Lokal (Input Pemda, Operator) minimum 2 ISP tiap kabupaten/kota

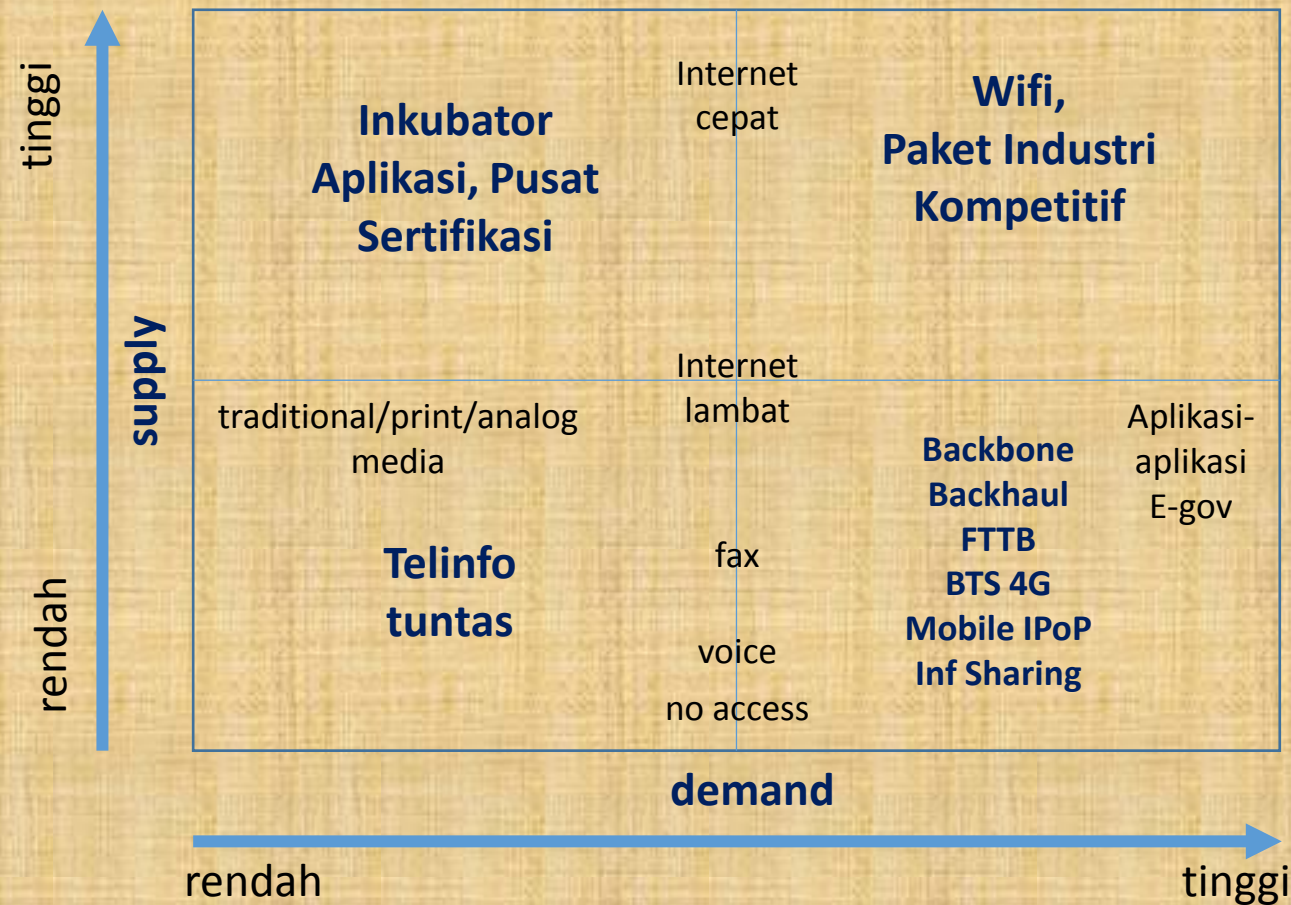
Sistem Komunikasi:

- Insentif Program Monev (pembentukan unit monev di daerah)

Sistem Regulasi:

- Bimbingan Teknis Perda Infrastruktur Bersama
- Bimbingan Teknis Perda Infrastruktur Pasif

Identifikasi kondisi supply – demand dan rekomendasi cluster program KPU/USO



Posisi Daerah



Hasil Perhitungan Prioritas

1 Perhitungan Prioritas Program KPU /USO Telekomunikasi						
2		Identitas Pengusul			Bobot Rerata	Prioritas
3 No	Provinsi	Kabupaten/kota	Prov_Kab			
4 18	Riau	Kampar	Riau_Kampar	0,76	I	
5 11	Maluku	Maluku Barat Daya	Maluku_Maluku Barat Daya	0,74	I	
6 26	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara_Kepulauan Sangihe	0,73	I	
7 2	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	Kalimantan Tengah_Gunung Mas	0,72	I	
8 7	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau_Kepulauan Anambas	0,72	I	
9 13	Maluku	Seram Bagian Timur	Maluku_Seram Bagian Timur	0,67	I	
10 30	Sumatera Barat	Payakumbuh	Sumatera Barat_Payakumbuh	0,66	I	
11 35	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Kalimantan Selatan_Barito Kuala	0,65	II	
12 33	SUMATERA SELATAN	Ogan Komering Ilir	SUMATERA SELATAN_Ogan Komering Ilir	0,65	II	
13 32	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN_BANYUASIN	0,65	II	
14 9	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Maluku_Maluku Tenggara Barat	0,64	II	
15 6	Kalimantan Tengah	Katingan	Kalimantan Tengah_Katingan	0,64	II	
16 10	Maluku	Maluku Tenggara	Maluku_Maluku Tenggara	0,64	II	
17 5	Kalimantan Tengah	Barito Utara	Kalimantan Tengah_Barito Utara	0,64	II	
18 19	Riau	Kepulauan Meranti	Riau_Kepulauan Meranti	0,63	II	
19 28	Sumatera Barat	Agam	Sumatera Barat_Agam	0,63	II	
20 3	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah_Barito Selatan	0,62	II	
21 24	Sulawesi Tengah	Donggala	Sulawesi Tengah_Donggala	0,59	II	
22 29	Sumatera Barat	Muaro Sijunjung	Sumatera Barat_Muaro Sijunjung	0,54	II	

Keterangan:

- Merah = prioritas I; skor 0,66 – 1,00
- Orange = prioritas II; skor 0,33 – 0,65
- Kuning = prioritas III; skor 0,00 - 0,32

Sumber: Hasil pengolahan data, 2014

SINERGITAS DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Kementerian/Lembaga	Sinergitas Program
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyediaan BTS di 31 pulau-pulau kecil
2	Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kerjasama penyediaan fasilitas TIK pada Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten.
3	Bank Indonesia	Pemanfaatan layanan USO dalam mengedukasi UMKM dalam pencatatan keuangan dan perbankan.
4	Kementerian Kesehatan	Optimalisasi server NIX untuk penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan Bank data.

Спасибо

Russian

ありがとうございました

Japanese

Gracias

Spanish

நன்றி

Tamil

Obrigado

Brazilian Portuguese

Terima Kasih

감사합니다



Grazie

Italian

Merci

French

Danke

German

Thank You

English

شكراً

Arabic

多謝

Traditional Chinese

ขอบพระคุณ

Thai

धन्यवाद

Hindi